

## **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang Kabupaten Lombok Utara**

Muhammad Suhaeri<sup>1</sup>, Baiq Kisnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi AMM Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

### **Abstract**

*The impact of the Covid-19 pandemic has also been felt in the sea transportation sector, especially ports that serve transportation in the tourism sector. The transportation sector is a sector related to development and development in the country's economy. This study aims to determine differences in financial performance before and during the Covid-19 pandemic at the Class II Pemenang Port Operations Unit Office. This study uses Budget Management Performance Indicators (IKPA) which are proxied by the quality aspects of budget planning, the quality aspects of budget execution and the quality aspects of budget implementation results in measuring financial performance. The location of this research was conducted at the Class II Pemenang Port Administration Unit Office. The data collection technique used is documentation with the type of quantitative data obtained secondarily through the financial reports of the Class II Winner Port Operations Unit Office. Data were analyzed using SPSS 23 with different tests and hypotheses. The results of this study indicate that there are differences in financial performance that are proxied by the quality aspects of budget planning, the quality aspects of budget execution and the quality aspects of the results of budget implementation before and during the Covid-19 pandemic at the Pemenang Class II Port Operations Unit Office.*

**Keywords:** *IKPA; financial performance; budget execution*

### **Abstrak**

Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan pada sektor transportasi Laut Terutama Pelabuhan yang melayani transportasi di sektor Pariwisata. Sektor transportasi merupakan sektor yang berkaitan dengan perkembangan serta pembangunan dalam perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang. Penelitian ini menggunakan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) yang diproksikan dengan aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek kualitas pelaksanaan anggaran dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dalam mengukur kinerja keuangan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan dokumentasi dengan jenis data kuantitatif yang diperoleh secara sekunder melalui laporan keuangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang. Data dianalisis menggunakan SPSS 23 dengan uji beda dan hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek kualitas pelaksanaan anggaran dan aspek

---

<sup>2</sup>Penulis korespondensi. baiqkisnawati@gmail.com

kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang.

**Kata kunci:** IKPA, kinerja keuangan, pelaksanaan anggaran.

## PENDAHULUAN

Sektor transportasi merupakan sektor yang berkaitan dengan perkembangan serta pembangunan dalam perekonomian negara. Transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat untuk mobilitas dan pengangkutan barang ke berbagai daerah, yang mendorong sektor transportasi menjadi salah satu penunjang aktivitas manusia. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor transportasi laut maupun darat.

Indonesia adalah negara kepulauan yang dengan adanya transportasi laut dapat membantu mobilitas penduduk yang semakin tinggi, terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat maupun udara. Transportasi laut juga merupakan salah satu urat nadi perekonomian Indonesia, jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian nasional juga terganggu (Susantono, 2014).

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal kuartal II Tahun 2020 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peraturan terkait pembatasan social berskala besar (PSBB) yang menimbulkan *lockdown* pada beberapa kota di Indonesia guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut, transportasi laut yang juga berdampak dengan adanya Covid-19. Penelitian yang dilakukan (Zheng *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa kasus melalui transportasi umum memberikan peranan penting dalam penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dilaporkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97% di kuartal IV Tahun 2019 menjadi 2,97 pada kuartal I Tahun 2020. Selain itu kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan perdagangan yang menyumbang 3,57% PDB. Hal ini membuat transportasi nasional secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga merugikan banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebesar Rp 405,1 triliun sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (<https://pasardana.id/news/2020/4/2/>).

Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan pada sektor transportasi laut terutama Pelabuhan yang melayani transportasi di sektor pariwisata dan untuk mencegah masuknya atau meluasnya pandemi dari sektor Pelabuhan membuat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang Heru Supriyadi, MM mengambil langkah dengan menutup semua akses wisata menuju tiga gili, yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno, kebijakan penutupan akan dilakukan di dua titik, Dermaga Senggigi dan Dermaga Bangsal dengan menginformasikan ke semua kapal yang melayani penyeberangan dari Bali ke Lombok. (Dok., 2022). Menurut (Heru, 2020), penutupan sementara ini merupakan skenario pembatasan akses pintu masuk yang dilakukan Pemprov NTB, sebagai upaya pencegahan dampak virus Corona setelah jadi pandemi dunia. Maka untuk mengantisipasi virus Corona, sebagai bentuk kewaspadaan, pihaknya menyampaikan kepada para nakhoda, pemilik atau operator, agen kapal penumpang baik *Fastboat* maupun *Publicboat* agar tidak melakukan embarkasi dan debarkasi di dua pelabuhan tersebut.

Sesuai Peraturan Menhub RI, 2021; *UU NO 17 TAHUN 2008*, n.d. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang NTB adalah salah Satu Instansi Pemerintah Pusat yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Pemenang juga termasuk Instansi Pemerintah yang paling terkena dampak dari adanya Pandemi Covid-19, dikarenakan di Pelabuhan Pemenang dan beberapa wilayah kerja Pelabuhan Pemenang memiliki aktivitas menyediakan transportasi untuk Penumpang asing atau Wisatawan asing, dimana sejak pandemi wisatawan asing yang berkunjung sangat minim, sehingga membuat Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan mengalami penurunan drastis. Disamping itu beberapa Pos anggaran pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang terkena Refocusing dan realokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sehingga Hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap beberapa Indikator Penilaian Kinerja Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi, hal ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi (Sumual *et al.*, 2017).

Beberapa Aspek yang dipakai untuk mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara menurut (Perdirjan Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2021) antara lain Aspek Kinerja Perencanaan Anggaran yang meliputi (a) Indikator Revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. (b) Aspek Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang meliputi (a) penyerapan anggaran, (b) belanja kontraktual, (c) penyelesaian tagihan, (d) pengelolaan UP dan TUP, dan (e) dispensasi SPM. Sementara aspek Kinerja Hasil Pelaksanaan Anggaran yang meliputi : Capaian *Output*.

Hasil penelitian (Ichlasul Amal *et al.*, 2022) mengatakan bahwa berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan atas perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup baik walaupun masih banyak yang dapat ditingkatkan kembali. Menurut (Ahffha Erikka, 2022) mengemukakan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan tidak adanya perbedaan *Total Assets Turnover Ratio*, rasion lancar, NPM, DER 0,05, berarti NPM setelah dan sebelum pandemi covid-19 pada perusahaan teknologi tidak ditemukan perbedaannya, yang berarti selama pandemi perusahaan masih dapat mempertahankan pendapatannya. Sedangkan menurut (Andi Mulyadi, 2021) dalam penelitiannya mengemukakan Pandemi Covid-19 yang merebak dengan cepat pada awal tahun 2020 telah memaksa terjadinya perubahan pada cara manusia berinteraksi. Hal ini ikut mempengaruhi kondisi pemberian layanan publik termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLU pada perguruan tinggi dan rumah sakit. Dengan terjadinya perubahan kondisi perekonomian masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, mengakibatkan kinerja keuangan dari BLU juga terdampak.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang"

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Komparatif. Penelitian Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan dokumentasi terhadap data-

data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai berupa laporan keuangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang dan Pengambilan Data dari Aplikasi OM SPAN Kemenkeu (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara*) pada Bulan 1 sampai dengan 12 Tahun 2019 dan 2020.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran yang meliputi: Aspek Kualitas Perencanaan dan Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran yang terdapat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang, dengan Data mengacu Pada OM SPAN (*Online Monitoring Sistem Penyelenggaraan Anggaran Negara*). Jumlah Populasi dalam Penelitian ini sebanyak 12 Bulan sebelum Pandemi tahun 2019 dan 12 Bulan saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dianalisis sehingga diperoleh hasil yang tetap. Data tersebut diperoleh dalam bentuk laporan keuangan. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder (*secondary data*), yang berasal dari laporan keuangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang pada Bulan 1 sampai dengan 12 tahun 2019 dan 2020. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah : Statistik Deskriptif dan Uji Beda (*Uji Paired Sample T-Test*). Oleh karena sampelnya sama Alat Ujinya Menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan (*Paired Sample t-test*) (Ghozali, 2018).

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  pada uji paired sample t-test adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018): (1) Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa terdapat perubahan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19. (2) Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa tidak terdapat perubahan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang perbedaan kinerja keuangan kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang sebelum dan selama pandemi Covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data *time series* atau data runtut waktu mulai tahun 2019-2020 selama 2 tahun. Populasi pada Penelitian ini adalah Kinerja keuangan Kantor UPP kelas II Pemenang yang di diukur menggunakan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) dengan tiga indikator yaitu Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Berikut ini data kinerja keuangan pada tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 1.** Data Kinerja Keuangan Indikator Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

Bulan	2019		2020	
	Revisi DIPA	Dev Hal III DIPA	Revisi DIPA	Dev Hal III DIPA
Jan	100	33	100	54,76
Feb	100	47,07	100	45,52
Mar	100	100	100	37,7
Apr	100	76,05	100	29,25
Mei	100	62,28	100	30,78
Juni	100	52,54	100	40,71
Juli	100	7,43	100	47,16
Agt	100	0	100	52,57
Sep	100	0	100	57
Okt	100	0	100	57,42
Nov	100	0	100	58,3

Bulan	2019		2020	
	Revisi DIPA	Dev Hal III DIPA	Revisi DIPA	Dev Hal III DIPA
Des	100	0	100	59,03
Rata-Rata	100	31,53083333	100	47,51666667

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel. 2** Data Kinerja Keuangan Indikator Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Bulan	2019					2020				
	Peny. Anggaran	Blj Kontr aktual	Peny Tagihan	Peng. UP dan TUP	Dispen sasi SPM	Peny. Anggaran	Blj Kontra ktual	Peny Tagihan	Peng UP dan TUP	Dispen sasi SPM
Jan	23,26	0	0	25	100	19,07	0	0	0	100
Feb	65,27	0	0	100	100	19,07	0	0	100	100
Mar	0	0	0	100	100	19,07	0	0	100	100
Apr	0	0	0	100	100	35,06	0	100	100	100
Mei	0	0	0	83	100	35,06	0	100	100	100
Juni	0	0	0	75	100	35,06	0	100	100	100
Juli	0	0	100	83	100	48,59	0	100	83	100
Agt	0	0	100	86	100	48,59	0	100	88	100
Sep	0	0	100	88	100	48,59	0	100	89	100
Okt	0	0	100	95	100	61,44	0	100	90	100
Nov	0	0	100	91	100	61,44	0	100	91	100
Des	0	0	100	88	100	61,44	0	100	93	100
Rata-rata	7,3775	0	50	84,5	100	41,04	0	75	86,167	100

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 3.** Data Kinerja Keuangan Indikator Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Bulan	Capaian Output	
	2019	2020
Jan	34,02	0
Feb	45,55	0
Mar	0	0
Apr	0	0
Mei	0	100
Juni	0	100
Juli	0	100
Agt	0	100
Sep	0	100
Okt	0	100
Nov	0	100
Des	0	100
Rata-Rata	6,630833	66,66666667

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 4.** Uji *Paired Sampels Test* Aspek Kualitas Perencanaan

		Paired Sampels Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kualitas_Perencanaan_Rev_Sbl - Kualitas_Perencanaan_Rev_Sdh	92,62 2	19,418	5,605	80,28 4	104,9 6	16,52 3	1 1	,000
Pair 2	Kualitas_Perencanaan_Dev_Sbl - Kualitas_Perencanaan_Dev_Sdh	37,10 3	36,591	10,56 2	13,85 4	60,35 2	3,513	1 1	,005

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel 4 uji *Paired Sampel T-Test* di atas, dapat diketahui (1) Nilai signifikan kualitas perencanaan Rev tahun 2019-2020 sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas perencanaan Revisi DIPA sebelum dan setelah adanya Covid-19. (2) Nilai signifikan kualitas perencanaan Dev tahun 2019-2020 sebesar  $0,005 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas perencanaan Deviasi Hal III DIPA sebelum dan setelah adanya Covid-19.

**Tabel 5.** Uji *Paired Sampels Test* Aspek Kualitas Pelaksanaan

		Paired Sampels Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kualitas_Pelaksanaan_PA_Sbl - Kualitas_Pelaksanaan_PA_Sdh	2,483	44,720	12,909	-25,930	30,897	,192	11	,851
Pair 2	Kualitas_Pelaksanaan_BK_Sbl - Kualitas_Pelaksanaan_BK_Sdh	43,460	22,201	6,409	29,353	57,566	6,781	11	,000
Pair 4	Kualitas_Pelaksanaan_PU_Sbl - Kualitas_Pelaksanaan_PU_Sdh	-68,369	58,106	16,773	-105,28	-31,45	-4,076	11	,002
Pair 5	Kualitas_Pelaksanaan_DS_Sbl - Kualitas_Pelaksanaan_DS_Sdh	13,833	27,777	8,018	-3,815	31,482	1,725	11	,112

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel 5 uji *paired sampel T-test* diketahui (1) Nilai signifikansi dari kualitas pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2019-2020 sebesar 0,851 >0,05. Karena nilainya lebih besar daripada 0,05 artinya tidak ada perbedaan secara signifikan sebelum dan setelah adanya Covid-19. (2) Nilai signifikan kualitas pelaksanaan belanja kontraktual tahun 2019-2020 sebesar 0,000 < 0,05. karena nilainya lebih kecil daripada 0,05 artinya terdapat perbedaan secara signifikan kualitas pelaksanaan belanja kontraktual sebelum dan setelah adanya Covid-19. (3) Pada uji *paired sampel T-test* aspek kualitas pelaksanaan ini, indikator ketiga yaitu penyelesaian tagihan, pada saat diuji tidak menunjukkan hasil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 maupun 2020 nilai indikator penyelesaian tagihan selama 12 bulan adalah 0. Oleh sebab itu secara otomatis SPSS tidak menunjukkan hasil pengolahan data. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian tagihan bukan merupakan kewenangan Satker akan tetapi menjadi kewenangan dan tugas dari BUN (Bendahara Umum Negara) yang diwakili Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram. (4) Nilai signifikan kualitas pelaksanaan pengelolaan UP & TUP tahun 2019-2020 sebesar 0,002 < 0,05. karena nilainya lebih kecil daripada 0,05 artinya terdapat perbedaan secara signifikan kualitas pelaksanaan pengelolaan UP & TUP sebelum dan setelah adanya Covid-19. (5) Nilai signifikan kualitas pelaksanaan dispensasi SPM nilai signifikan sebesar 0,112 > 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan kualitas pelaksanaan dispensasi SPM sebelum dan setelah adanya Covid-19.

**Tabel 6.** Uji *Paired Sampels Test* Aspek Kualitas Hasil

		Paired Sampels Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kualitas_Hasil_Output_Sbl - Kualitas_Hasil_Output_Sdh	33,333	49,236	14,213	2,049	64,616	2,345	11	,039

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel 6 uji *Paired Sampel T-test* di atas, diketahui nilai signifikan aspek kualitas hasil capaian *output* sebesar 0,039 < 0,05 artinya terdapat perbedaan aspek kualitas hasil capaian *output* sebelum dan setelah adanya Covid-19. Adanya perbedaan capaian *output* tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari pengelola anggaran yang tidak menginput capaian *output* anggaran pada aplikasi sehingga membuat capaian *output* kantor UPP Pemenang menjadi berkurang.

Dari ke delapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat enam indikator yang menunjukkan perbedaan secara signifikan dan dua indikator lainnya tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang secara umum dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 secara signifikan. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan IKPA dengan indikator Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Kualitas Hasil.

Pada penelitian ini mengenai perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah adanya Covid-19 periode 2019-2020, menyimpulkan hasil sebagai berikut:

### **Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan Aspek Kualitas Perencanaan Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19.**

Hipotesis pertama berdasarkan tabel 4.5 uji *Paired Sampel T-Test* di atas, diketahui nilai signifikan kualitas perencanaan Rev sebesar  $0,000 < 0,05$  dan kualitas perencanaan Dev sebesar  $0,005 < 0,05$  artinya hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah adanya Covid-19 hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan IKPA dengan indikator aspek kualitas perencanaan Revisi DIPA dan Deviasi Hal III DIPA pada sebelum dan setelah Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2021) dan Purnomo (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

### **Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan Aspek Kualitas Pelaksanaan Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19**

Hipotesis kedua berdasarkan tabel 4.6 diatas uji *paired sampel T-test* diketahui nilai signifikansi dari kualitas pelaksanaan penyerapan anggaran dan kualitas pelaksanaan dispensasi SPM tahun 2019-2020 sebesar  $0,851 > 0,05$  dan  $0,112 > 0,05$  maka hipotesis ditolak karena nilainya lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan secara signifikan sebelum dan setelah adanya Covid-19, sedangkan nilai signifikan kualitas pelaksanaan belanja kontraktual dan pengelolaan UP & TUP tahun 2019-2020 sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $0,002 < 0,05$  maka hipotesis diterima karena nilainya lebih kecil daripada 0,05 yang artinya terdapat perbedaan secara signifikan kualitas pelaksanaan belanja kontraktual dan pengelolaan UP & TUP sebelum dan setelah adanya Covid-19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kontrak kerja pekerjaan lanjutan pada sebelum pandemi dan dilanjutkan pada saat pandemi, selain itu juga pada saat pandemi Covid-19 dilakukannya pembatasan aktivitas di luar lapangan sehingga mengakibatkan UP dan TUP yang dikelola sulit dibelanjakan sehingga mempengaruhi perputaran UP dan TUP tiap bulannya. Adanya perbedaan pada Kualitas Pelaksanaan Anggaran disebabkan karena selama masa Pandemi Covid-19 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang sesuai arahan pemerintah beberapa menerapkan kebijakan WFH (*Work From Home*) bagi para pegawainya termasuk Pegawai yang mengurus Keuangan. Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Pengguna Jasa juga berkurang secara drastis sehingga berdampak terhadap realisasi Anggaran yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Banyaknya toko-toko yang tutup juga berdampak terhadap realisasi Anggaran karena Pengelola Keuangan (Pejabat Pengadaan) agak susah dalam memilih toko untuk Belanja.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2021) dan Purnomo (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan pengelolaan UP dan TUP sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

### **Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19**

Hipotesis ketiga berdasarkan tabel 4.7 uji *Paired Sampel T-test* di atas, diketahui nilai signifikan aspek kualitas hasil capaian *output* sebesar  $0,039 < 0,05$  yang artinya terdapat perbedaan aspek kualitas hasil capaian *output* sebelum dan setelah adanya Covid-19 maka hipotesis diterima.

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang telah dirubah menjadi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 menyebutkan bahwa Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap



kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa Capaian *Output* yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* dan nilai kinerja atas capaian Rincian *output*.

Adanya penghematan Anggaran Saat Pandemi Covid-19 membuat pagu anggaran turun, begitu juga dengan target capaian output pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang di tahun 2020. Hal ini dirasa cukup berat, sebab walaupun target capaian menurun, namun angka pasien positif Covid-19 masih terus meningkat membuat pelaksanaan perjalanan dinas menjadi sulit. Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan dinas adalah dengan mengantongi surat bebas Covid-19, biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti tes tersebut cukup mahal dan pagu anggaran setelah dilakukan penghematan sangat terbatas sehingga muncul kekhawatiran pegawai tidak dapat melakukan perjalanan dinas yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil capaian pada akhir tahun 2020. Selain Perjalanan Dinas Terbatasnya aktivitas diluar Rumah juga mengganggu beberapa Pekerjaan Fisik dan Belanja Barang Operasional dan Non Operasional yang ada di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang sehingga berdampak pada Realisasi Output Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2021) dan Purnomo (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

## SIMPULAN

Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dari Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Revisi DIPA dan Deviasi Hal III DIPA pada saat sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dari Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP dan TUP pada saat sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Namun tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dari Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan Dispensasi SPM pada saat sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dari Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Capaian *Output* pada saat sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahffha, E., & Pradana, M. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Teknologi Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 198-209. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.216>
- Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dishub. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap transportasi umum.
- Dok. (2022). Dokumentasi Kantor UPP Kelas II Pemenang.
- Heru. (2020). Antisipasi Covid-19 di NTB, Pelayaran Ke Tiga Gili Ditutup Sementara.
- Hidayat, M. (2021). Analisis perbandingan kinerja keuangan dan nilai perusahaan sebelum dan disaat pandemi covid 19. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 15(1), 9-17.
- Menteri Keuangan RI. (2018). Pmk Nomor 195/Pmk.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Perdirjen Pb-PER\_5\_PB\_2022 Juknis IKPA Belanja KL. (n.d.).
- Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. (2022). Perdirjen Pb-PER\_5\_PB\_2022 Juknis IKPA Belanja KL (1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni. (2019). *Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sumual, C. D., Kalangi, L., Gerunggai, N. Y., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
- Susantono, B. (2014). Transportasi Laut, Urat Nadi Perekonomian Nasional. <http://dephub.go.id/post/read/transportasi-laut-urat-nadi-perekonomian-nasional-60496?language=id>
- Zheng, Y. Y., Ma, Y. T., Zhang, J. Y., & Xie, X. (2020). COVID-19 and the cardiovascular system. *Nature Reviews Cardiology*, 17(5), 259–260. <https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5>